

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adelia Tiara Oktaviani, (2020). *Korupsi Yang Membudaya Di Indonesia*. in Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Agus wibowo.(2022) *Pengetahuan Anti Korupsi Dan Integritas*.in Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Agustine,(2020). *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*.in Depok: Rajawali Press,
- Amirudin. (2021) *Penghantar Metode Penelitian Hukum*.in Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Anwar. (2021.) *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi*. in Jakarta: Suluh Media.
- Arifin. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. in jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Candra Irawan. (2025). *Studi Perbandingan Hukum*.in Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Chazawi, Adami. (2023). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. in Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatzmiko. (2020).*Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*. in Yogyakarta: Thafa Media.
- Doni Azhari, (2024). *Sosiologi Hukum*. in Jawa Timur: Duta Sains Indonesia.
- Efendi, Sumardi. (2024)*Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. in Jakarta: Pt Adikara Cipta Aksa.
- Gozali, Djoni Sumardi. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Imran, Mohammad Fadil. (2024) *Perbandingan Sistem Hukum*.in Surakarta: Tahta Media Group.
- Indra Yudha Koswara, Aris Munandar. (2024) *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Masalah Hukum Dalam Negara Kesejahteraan*. in Jakarta: Deepublish.

- Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi. (2022). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*. in Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Leo, Siyuan Chen dan Lionel. (2021) *The Law of Evidence in Singapore*. Singapore: Sweet & Maxwel.
- Liew, Clement. (2022) *Crupulous, Thorough, Fearless: The CPIB Story*. in Singapore: World Scientific Publishing Company.
- Melani ho. (2024). *Bribery & Corruption Laws and Regulations 2025 – Singapore*. in Singapore: Global Legal Insight.
- Mikhael Feka. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*.in Jambi: PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia.
- Pujianti. (2024) *Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum*. in Yogyakarta: Deepublish.
- Putra, Risqi Perdana. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rohmat.N.(2024). *Sistem Peradilan Pidana*. in Yogyakarta: K-Media.
- Rukminingsih. (2020) *Metode Penelitian Pendidikan*. In Yogyakarta: Erhaka Utama.
- Sugiyono. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.in Bandung: Alfabeta..
- Suyono.(2020). *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. in Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Soerjono Soekanto.(2020) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. in Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin.(2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. in Jakarta: Prenada Media.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2022) *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. in Jakarta: Salemba Empat.
- Widiarty.(2024). *Metode Penelitian Hukum*.in Yogyakarta: Publika Global Media

B. Artikel Ilmiah

- Adnantara, Kadek Frediandrika., Dinamika Penegakan Hukum Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tegas, Cepat, Dan Tanggap Dalam Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. *Jurnal Hukum*, (2025). vol. 10, no. 2.
- Agung, I. G. A. N., SH, M., & Simon Nahak, S. H. (2025). *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahan Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Dira Media Kreasindo. vol. 5, no. 3.
- Akbar, M. I. (2021). Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. vol. 10, no. 3.
- Alvina, V. N. (2023). *Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. *Jurnal Hukum*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). vol. 21, no. 9.
- Angelia, Tiara, Asep Suherman., Tinjauan Yuridis Negara Indonesia Dan Singapura Sebagai Bentuk Komparasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (2025). vol. 10, no. 2.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 4, no 311-321.
- Azzahra Aundina Tangahu., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, (2025). vol. 10, no. 102-104.
- Arihta, Gita, Uli Teresia, Br Tarigan, and Mian Fransiska Sianturi. "Comparison Of The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption In Indonesia, Malaysia And Singapore." *Journal Awang Long Law Review*, (2022). vol. 5, no. 12-15.
- Alfaizah Sabani Hasanah Suardi, , Andi Istiqlal Assaad, Sutiawati. "Legal Analysis Of Reverse Burden Of Proof In Corruption Criminal Acts In The Jenepono District Prosecutor's Office." *Journal Legal Dialogica*, (2023). vol. 8, no. 2-3.
- Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, Heryanto Heryanto. "Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Law Jurnal*, (2025). vol. 5, no. 100-104.
- Darwin Pane, M. (2018). Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Majalah Ilmiah UNIKOM*, vol. 16, no 1.

- Dewantara, Suji. Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (2025). vol. 11, no. 10-21.
- Effendi, Tolib, and Rusmilawati W. Integritas Antikorupsi Dualisme Konsep Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Integritas*, (2022). vol. 21, no. 101-121.
- Florentinus Sudiran., Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati. *Jurnal Legalitas*, (2020). vol. 13, no. 10-21.
- Fauza Qadriah, Bagus Ramadi, Aminudin Aminudin. Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, HongKong, Dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, (2025). vol. 20, no. 22-32.
- Hamdani, Hamdani, and Halimatus Sa'diyah., Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis Dan Kajian Teori Dalam Penelitian. *Journal of Linguistics and Social Studies*, (2025). vol. 40, no. 22-31.
- Hao, Loh Eng, and Cheng Xiang Long. Introduction to Correctional Rehabilitation in Singapore Prison Service. *Journal World Scientific*, (2023). vol. 13, no. 12-35.
- Harefa, Jevan E, Evan Vaskal Ateta Pandia Pandia, Andrean Stefhan Situmorang, and Mazmur S.R. Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif Terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, (2024). vol. 19, no. 22-31.
- Hidayat, Ade Rachmad. Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan Asas Dominus Litis Yang Melekat Pada Jaksa. *Jurnal Cendekia*, (2025). vol. 13, no. 33-35.
- Hidayatullah, m. T. (2025). *Konsep perampasan aset dan perluasan pada rancangan undang-undang sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif restoratif*. *Jurnal Hukum*. (Doctoral dissertation, Nusa Putra University). vol. 35, no. 11-18.
- Husna Amelia, Aji Mulyana, Mia Amalia. Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Kelemahan Regulasi Dan Implikasi Praktis. *Journal Of Contemporary Law Studies*, (2025). vol. 16, no. 40-62.
- Indriastuti, Dwi, and Teguh Kurniawan. Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem. *Jurnal Kebijakan Publik*, (2024). vol. 15, no. 22-32.

- Jambia, Muhammad Adi, Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Anti-Corupption*, (2025). vol. 7, no. 22.
- Karimullah, Abdul. Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan (Studi Putusan Nomor 217 / Pid . B / 2019 / Pn Bna Dan Putusan Nomor 96 / Pid / 2022 / Pn Bna). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, (2025). vol. 4, no.5.
- Kemal, Guyus. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sistem Penuntutan Tunggal Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Legal System and Novelty*, (2024). vol. 5, no. 17
- Kristanto, Kiki. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungau*, (2021). vol. 6, no.3
- Lukito, Ratno., Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, (2022). vol. 6, no. 21-32.
- Lumenta, Praisly D.L, Nixon Wulur, and Jolanda Marlien . Inkonsistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, (2025). vol. 9, no. 12-13.
- Lesta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (2021). vol. 8, no. 10
- M. Rochman, Rony Wirachman, M. Iham Adepio., Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Dan RUU KUHAP Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, (2025). vol. 6, no. 21
- Minulyo, T. W. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan*. *Jurnal Hukum*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). vol. 4, no 5.
- Muhammad Ikhwan., Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Analisis Hukum*, (2022). vol. 3, no. 1-5.
- Munawaroh, Nafiatul.,Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik. *Jurnal Lex Renaisan, Jurnal Hukum* .(2021). vol. 3, no. 1-4..
- M. Rochman, Rony Wirachman, M. Iham Adepio. Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Dan RUU KUHAP Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, (2025). vol.6, no. 41-42.

- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. *Jurnal Hukum* . Sinar Grafika (Bumi Aksara). vol. 7, no. 12-13.
- Mahmudah, Reyna Yuliza, and Intan Prihatini. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Serta Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt.Pst). *Jurnal Hukum*, (2020). vol. 4, no. 62-72.
- Muntazah, Afwah, Bisyrul Maulana Ali, and Nadya Riyanti Rahmawati. Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, (2025). vol. 3, no. 12-18.
- Muhammad, Nur, and Kasyiful Khofa. Reformasi Pengaturan Gratifikasi : Analisis Perbandingan Indonesia , Singapura , Dan Korea Selatan. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, (2025). vol. 20, no. 22-32.
- Napoleon Rosisca, Dian Anriyani, Fandy Herianto, Elsi Kartika, and SariI. Budaya Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Education Review*, (2024). vol. 2, no. 29-35.
- Priska Amalia, Marsha Nara Andira, Bela Annisa Putri, Muhammad Rifqi Faeruzi Amien, Mawar Mawar. Perbandingan Model Penanggulangan Korupsi Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, (2024). vol. 6, no. 29-31.
- Ramadhan, Adam., Kamilla Akhfa Sulaeman, Aura Nasya Madhani Harahap, Fakhri Asshidiqy, and Irwan Triadi. “Perbandingan Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Negara Indonesia Dengan Negara Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024). vol. 1, no. 22-39.
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA. *Jurnal Hukum* .vol. 2, no. 44-45.
- Setyaning Rahayu, Sidik Sunaryo. Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2025). vol. 30, no. 19-20.
- Siregar, F. S. (2024). *PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid. Sus. K/2013/PN. Mdn.)*. *Jurnal Hukum*. (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh). vol. 15, no. 17-18.
- Sukiyat, H. (2020). *Teori dan praktik pendidikan anti korupsi*. Jakad Media Publishing. vol. 18, no. 23-32.
- Sulardi, Andreas, and Anna Erliyana. Kajian Good Governance Singapura Dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi. *Journal Law Review*, (2021). vol. 20, no. 44-67.

Tridian Hariwangsa, Henny Yuningsih. Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024). vol. 20, no. 21-32.

Zaihan Harmaen Anggayudha, Kayla Zevira Alfasha. Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Hukum*, (2023). vol. 15, no. 15-42.

C. Skripsi

Sadiyah, Siti Halimah. *Implementasi Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Dan Malaysia*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

E. Internet

Chia, Caroline. "Corruption-Related Reports Drop 18% in 2024; Private Sector Cases Account for Majority of Investigations: CPIB." Chanel New Asia, 2025. <https://www.channelnewsasia.com/singapore/corruption-reports-private-public-sector-cpib-investigations-5156456>

CPIB. *Prevention Of Corruption Act*, 2025. <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/prevention-of-corruption-act/>

Nathasya, Shafira Nadya. "CPIB Singapore and the Power of Public Vigilance Against Corruption." *Sea Actions*, 2025.

<https://www.seaanticorruption.org/2025/02/27/cpib-singapore-and-the-power-of-public-vigilance-against-corruption>.

Paramitha, Diandra. *Singapura Jadi Negara Paling Bersih Dari Korupsi Di Asia-Pasifik, Peringkat 3 Dunia*, 2025. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/03/05/singapura-jadi-negara-paling-bersih-dari-korupsi-di-asia-pasifik-peringkat-3-dunia>.

Singapore Legal Advice. *Prosecutorial Discretion in Singapore.*, 2024. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/prosecutorial-discretion-singapore/>.

Zararah Azhim, Wana Alamsyah. "Penindakan Korupsi 2024 Merosot Tajam: Rekor Terburuk Dalam 5 Tahun Terakhir." Indonesian Corruption Watch, 2025. <https://antikorupsi.org/id/penindakan-korupsi-2024-merosot-tajam-rekor-terburuk-dalam-5-tahun-terakhir>.

